

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

Dalam bab II ini, penulis akan fokus menjelaskan mengenai bagaimana dinamika politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, yang dilihat dari kebijakan prioritas yang dibuat. Terdapat tiga fokus kebijakan yang akan penulis kembangkan, yaitu dalam bidang ekonomi, politik, dan juga keamanan. Dinamika politik luar negeri ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor yang berperan penting dalam setiap kebijakan yang dibuat dalam politik luar negeri Donald Trump. Terdapat aktor negara dan aktor non negara yang berperan dominan terhadap suatu politik luar negeri Amerika Serikat. Dalam setiap isu yang sedang dihadapi Amerika, aktor-aktor yang berperan didalamnya tentu saja berbeda-beda. Pada isu-isu politik aktor negara sangat berperan penting dalam setiap kebijakan luar negeri yang dibuat, sedangkan untuk isu ekonomi terdapat aktor non negara yang ikut berperan didalamnya. Untuk melihat bagaimana hubungan antara isu dan peran aktor dalam politik luar negeri Donald Trump, dapat kita lihat berikut ini.

A. Kebijakan Ekonomi Donald Trump

Kebijakan dalam hal ekonomi ini sangat berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu negara. Donald Trump merupakan seorang pengusaha terkenal asal Amerika Serikat, dimana latar belakangnya sebagai pengusaha ini mempengaruhi setiap kebijakan yang ia ambil khususnya dalam hal perekonomian. Pilihan-pilihan kebijakan yang Trump buat membuatnya semakin rasional karena ia tahu dan merasakan berada di posisi para pengusaha. Pada awal kampanye presidennya tahun 2016 lalu, isu politik luar negeri dalam hal ekonomi yang menarik perhatian publik adalah dalam hal perdagangan. Donald Trump berkomitmen terhadap perdagangan yang memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Trump

akan memikirkan ulang mengenai perjanjian perdagangan dengan menyarankan untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perdagangan dengan para negosiator yang memiliki tujuan akan membuat Amerika Serikat menjadi pemenang dalam negosiasi tersebut. Hal ini dapat ditempuh dengan menarik Amerika Serikat dari perjanjian seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jika penataan ulang tidak dapat tercapai (BBCNews, 2016). Kemudian Trum juga melakukan penarikan Amerika Serikat dari negosiasi TPP (*Trans-Pacific Partnership*). Semua ini dilakukan Trump untuk menindak negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional yang menyebabkan Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan.

Dalam hal tarif perdagangan, Trump juga akan melakukan kebijakan luar negeri dengan memberlakukan tarif impor sebesar 35 persen dari negara Meksiko, dan 45 persen dari produk negara Tiongkok (BBCNews, 2016). Hal ini dilakukan oleh Trump dengan tujuan untuk menciptakan daya beli yang lebih tinggi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat. Seperti doktrin dalam politik luar negeri Donald Trump yaitu "*America First*" dimana Trump ingin membangkitkan semangat nasionalisme di Amerika Serikat dengan mencegah adanya intervensi dari dunia internasional terhadap urusan dalam negerinya. Trump ingin mengembalikan kejayaan ekonomi negara ini dengan membawa pulang para pekerja dan industri kembali berpusat di Amerika Serikat. Salah satu cara yang dapat ia tempuh adalah dengan melakukan pemotongan pajak untuk semua orang, dan mengurangi jumlah pajak penghasilan federal yang harus dibayarkan, sehingga hal ini dimaksudkan agar para pengusaha mau membuka produksinya di negaranya sendiri yaitu di Amerika Serikat.

Untuk mewujudkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam bidang ekonomi yang berdasarkan pada “*America First*”, pemerintahan Donald Trump melakukan berbagai langkah berikut. Seminggu setelah Donald Trump resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif penarikan Amerika Serikat dari negosiasi perdagangan TPP. Selanjutnya, pada saat ini presiden Trump masih terus melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian NAFTA (*North America Free Trade Agreement*). Donald Trump menyampaikan bahwa pada saat ini Amerika Serikat akhirnya telah sampai pada dekade dimana transaksi perdagangan tidak adil, mengorbankan kemakmuran AS dan mengirim perusahaan, pekerjaan, dan kekayaan Amerika Serikat ke luar negeri (TheWhiteHouse, 2018). Pemerintahan Trump lebih berfokus pada kerjasama bilateral antar dua negara dibandingkan harus melakukan perjanjian kerjasama multilateral yang menurut Trump merugikan Amerika Serikat. Trump memilih untuk langsung menjalin hubungan kerjasama dengan satu negara seperti negara Meksiko yang merupakan salah satu negara anggota NAFTA. Administrasi Trump telah melakukan kesepakatan perjanjian dengan Meksiko yang memodernkan dan menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan untuk mencerminkan realitas abad ke-21 (TheWhiteHouse, 2018). Kesepakatan ini akan menciptakan lebih banyak perdagangan antara AS dengan Meksiko yang dapat menumbuhkan ekonomi, mendukung pekerjaan bergaji tinggi untuk pekerja Amerika, dan melindungi kekayaan intelektual Amerika (*ibid*). Presiden Donald Trump melakukan modernisasi atau pembaharuan pada aturan yang ada pada NAFTA, dikarenakan menurut Trump aturan NAFTA yang dulu dianggapnya sudah ketinggalan jaman dan tidak seimbang, serta merugikan para pekerja dan bisnis Amerika Serikat.

Untuk melindungi para pekerja di Amerika Serikat dari ancaman upah yang rendah dan perlakuan yang semena-mena, maka Trump melakukan politik luar negerinya seperti berikut. Berdasarkan pernyataan yang ditulis dalam website White House, pemerintahan Trump mencapai kesepakatan kerjasama dengan *European Commission* untuk bekerja sama dalam penghapusan tarif, meningkatkan ekspor energi, mengurangi hambatan non-tarif, dan menangani perdagangan yang tidak adil. Kemudian presiden Trump juga telah berhasil mengamankan amandemen kunci dari perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan untuk memperkuat basis manufaktur Amerika Serikat. Selain perlindungan langsung terhadap buruh, Trump juga melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri di Amerika Serikat. Presiden Trump melakukan peningkatan terhadap tarif impor dari produk baja dan aluminium, untuk impor baja ke Amerika Serikat dikenakan tarif sebesar 25 persen dan 10 persen untuk tarif impor aluminium (Johnson, 2018). Hal ini Trump lakukan untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik dari ancaman produk luar.

Politik luar negeri pemerintahan Donald Trump lebih berfokus pada kepentingan Trump untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Trump melihat banyaknya ancaman-ancaman yang dihadapi para pekerja maupun perusahaan di dalam negeri sehingga ia melakukan proteksi terhadap pekerja dan perusahaan Amerika Serikat dari dunia luar. Dalam politik luar negeri di bidang politik aktor negara tidak dapat memainkan peran secara keseluruhan dalam penentuan pembuatan kebijakan luar negeri. Adanya aktor non negara yang dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri di Amerika Serikat. Aktor non negara ini lebih terfokuskan pada para pengusaha maupun individu yang memberikan dukungan

maupun tuntutan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

B. Kondisi Politik Luar Negeri Era Donald Trump

Politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik merupakan sebuah cara yang dilakukan Amerika untuk mempertahankan citra yang dimilikinya di mata dunia internasional. Politik merupakan *struggle of power*, dimana untuk memiliki pengaruh yang kuat atau dominan di dunia internasional dibutuhkan kekuatan yang dapat diwujudkan melalui setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Bentuk-bentuk politik luar negeri Amerika Serikat dalam bidang politik umumnya seperti memberikan bantuan-bantuan luar negeri untuk negara-negara yang membutuhkan, melakukan kunjungan luar negeri yang merupakan bagian dari *soft diplomacy*, bergabung dalam masyarakat internasional dengan cara masuk menjadi anggota organisasi-organisasi internasional, dan masih banyak cara yang dilakukan lainnya. Dibalik setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat ini tentunya akan ada kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika demi memperoleh keuntungan untuk kemakmuran dan kebaikan dari rakyat Amerika Serikat itu sendiri.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, politik luar negeri Amerika Serikat tentunya tidak dapat dipisahkan dari keuntungan ekonomi yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sendiri. Trump banyak melakukan pertemuan sebagai cara terciptanya perundingan dengan negara-negara, baik itu antara Amerika Serikat dengan satu negara atau melakukan perundingan dalam sebuah pertemuan besar dengan banyak negara. Perundingan tersebut dilakukan Trump untuk tercapainya kesepakatan yang mayoritasnya merupakan bidang kerjasama perdagangan. Donald Trump tidak ingin melakukan kerjasama dengan sebuah negara atau organisasi jika Amerika Serikat tidak mendapatkan keuntungan dari

kerjasama yang dilakukannya tersebut. Seperti pada pertemuan yang belum lama ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi G7 yang beranggotakan Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat sendiri. Pertemuan G7 tersebut dilaksanakan di Kanada pada tanggal 8-9 Juni 2018. Donald Trump menggunakan pertemuan tersebut sebagai suatu cara untuk mewujudkan kepentingan Amerika Serikat dan menyebarkan pengaruhnya dalam dunia internasional.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump setelah Amerika Serikat melakukan Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Kanada bahwa Trump telah memproklamasikan adanya perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan berupa penghapusan tarif dan subsidi. Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah menjadi korban dari perdagangan yang tidak adil, dan ia tidak ingin hal ini terus terjadi. Presiden Trump telah melakukan negosiasi-negosiasi dengan negara anggota tentang perlunya perdagangan yang adil dengan adanya timbal balik (TheWhiteHouse, Press Conference by President Trump After G7 Summit, 2018). Tidak hanya isu ekonomi yang Donald Trump bahas pada pertemuan tersebut, adanya isu lain seperti membahas masalah migrasi yang tidak terkendali dan ancaman yang ditimbulkannya bagi keamanan nasional, serta warga negara dan kualitas mereka (*ibid*). Hal ini sejalan dengan tujuan negara Amerika Serikat untuk mencegah adanya imigran masuk sehingga dapat tercipta keamanan nasional di Amerika Serikat.

Donald Trump tidak hanya melakukan politik luar negeri dengan cara mengikuti konferensi tingkat tinggi, namun ia juga melakukannya dengan langsung melakukan pertemuan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dengan Amerika Serikat. Untuk menjaga citra AS sebagai penjaga perdamaian di mata

dunia internasional dan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang kuat maka Trump melakukan pertemuan dengan Korea Utara. Trump melakukan pertemuan dengan presiden Korea Utara setelah Konverensi Tingkat Tinggi G7 di Singapura, dengan tujuan Korea Utara supaya menyerahkan senjata nuklirnya dan merangkul perdagangan dan keterlibatan dengan seluruh dunia (TheWhiteHouse, Press Conference by President Trump, 2018). Presiden Trump menjadi presiden AS pertama yang duduk untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara ketika ia bertemu dengan Kim Jong Un di Singapura. Kedua pemimpin tersebut menandatangani pernyataan bersama yang menyetujui denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea, jaminan keamanan untuk Korea Utara, bekerja menuju rezim perdamaian, dan pemulihan dan repatriasi segera POW / MIA (BureauOfEastAsianAndPacificAffairs, 2018).

Presiden Donald Trump tidak selamanya melakukan diplomasi sebagai politik luar negerinya untuk mendapatkan sekutu-sekutu yang dapat mendukung Amerika Serikat dalam perpolitikan internasional. Kita dapat melihat pernyataan-pernyataan kontroversial yang Donald Trump sampaikan dalam pernyataan pers atau ia tulis dalam akun media sosial pribadinya. Pernyataan-pernyataan yang berisi konten yang dapat menyinggung negara lain sehingga dapat mengakibatkan politik dua negara tersebut memanas dan menimbulkan musuh baru bagi AS. Selain dari pernyataan Trump, kebijakan luar negeri yang ia buat juga dapat mengakibatkan politik kedua memanas dengan sanksi yang didapatkan oleh Amerika. Seperti kebijakan luar negeri Trump untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium, membuat beberapa negara memberikan komentar pedas bagi Amerika Serikat. Pernyataan-pernyataan Trump tersebut juga memunculkan adanya “Anti Amerika” dari beberapa negara seperti Meksiko dan Kanada.

Gaya politik luar negeri Donald Trump dalam hal politik ini sangat berbeda dengan presiden pendahulunya dulu, Barack Obama. Adanya pertemuan atau kunjungan ke negara-negara lain adalah untuk tujuan ekonomi sebagai fokus utama dalam pemerintahan Donald Trump. Dalam politik luar negeri di bidang politik, aktor yang berperan penting dalam pembuatan keputusan adalah presiden dan juga kongres. Aktor lain seperti Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, CIA, Kantor Perwakilan Dagang AS adalah sebagai aktor pendorong yang memberikan info-info yang dibutuhkan oleh Presiden Donald Trump dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Donald Trump sebagai seorang pengusaha membuat setiap kebijakan luar negerinya harus pada keuntungan sebanyak mungkin sebagai upayanya untuk mewujudkan kampanyenya “*Make America Great Again*”.

C. Kebijakan Luar Negeri AS dalam Isu Keamanan

Keamanan dari suatu negara tentunya tidak dapat terpisahkan dengan pertahanan, jadi keamanan dan pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amerika Serikat membuat kebijakan luar negeri dalam hal keamanan yang bertujuan untuk menjaga negaranya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan dari luar. Pemerintahan Donald Trump berkomitmen untuk membangun kembali militer Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dengan kekuatan yang dimiliki, sebagai prioritas bangsa ini (TheWhiteHouse, National Security & Defense). Sebelum Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menciptakan keamanan internasional, sebelumnya negara ini harus melakukan pembenahan terhadap kekuatan militernya terlebih dahulu. Adanya sejarah yang kelam yang dialami oleh Amerika Serikat yaitu adanya peristiwa 11 September 2001 yang merupakan sebuah serangan terorisme dan mengakibatkan tewasnya ribuan orang rakyat Amerika.

Dengan adanya peristiwa ini membuat Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militer di negaranya untuk terciptanya keamanan dalam negeri.

Pengambilan keputusan dalam hal pertahanan pada administrasi Donald Trump berupa strategi besar untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di luar negeri, dengan menentukan ukuran dan komposisi angkatan bersenjata yang diperlukan untuk memenuhi kekuatan militer, dan dengan menciptakan anggaran pertahanan yang memadai untuk dapat mewujudkan hal tersebut (Haffa, 2017, p. 25). Amerika Serikat menghadapi tiga ancaman untuk keamanan AS dan kepentingan vital di luar negeri. Pertama adalah saat ini adanya kekuatan konvensional yang meningkat dari Tiongkok untuk mencari dominasi regional di Pasifik Barat. Kedua, penggunaan kekuatan *proxy* Rusia untuk mendorong kembali kebebasan politik dan terbukanya pasar di negara-negara di Eropa Timur Ketiga adalah perluasan potensi nuklir dan ideologis kekuatan Iran di Timur Tengah (Haffa, 2017, p. 29). Untuk melakukan pelucutan penggunaan senjata nuklir yang digunakan oleh beberapa negara di dunia seperti Iran dan juga Korea Utara maka Trump melakukan adanya sanksi berupa embargo untuk Iran, dan melakukan pertemuan dengan presiden Korea Utara untuk membujuk negara itu agar melajuti senjata nuklirnya.

Pembangunan tembok raksasa sebagai pembatas antara negara Amerika Serikat dengan negara Meksiko merupakan langkah yang ditempuh oleh Donald Trump untuk mencegah para imigran masuk. Imigran ini biasanya melakukan penyelundupan terhadap obat-obatan terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Amerika Serikat. Jika wilayah perbatasan ini dibiarkan terbuka, Trump merasa khawatir dengan adanya kejahatan yang dapat terjadi seperti terjadinya perdagangan manusia. Adanya larangan untuk orang-orang muslim masuk ke Amerika Serikat melalui

kebijakan *Muslim Ban* dilakukan Trump sebagai pencegahan masuknya terorisme ke negara ini, dimana AS telah mempunyai pengalaman yang pahit terhadap permasalahan dengan teroris. Untuk melindungi warga negara dari ancaman dunia luar, pemerintahan Trump memperkuat keamanan standar untuk melakukan perjalanan atau *traveling* ke Amerika Serikat.

Pada awal tahun 2017, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 13780, yang meminta Sekretaris Keamanan Dalam Negeri untuk mengembangkan *baseline* minimum baru untuk seberapa banyak berbagi informasi dari negara-negara asing diperlukan untuk menentukan apakah warga negara mereka yang akan masuk ke Amerika Serikat membawa ancaman atau tidak bagi bangsa Amerika (TheWhiteHouse, President Donald J. Trump Strengthens Security Standards For Traveling to America, 2017). Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan perbatasan dan imigrasi AS memadai untuk melindungi keselamatan dan keamanan rakyat Amerika. Negara lain harus bekerjasama dengan Amerika Serikat dengan memberikan data-data pelaku kriminal sehingga inteligen di Amerika Serikat dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan untuk mencegah masuk ke negara ini.

Untuk mewujudkan langkah-langkah politik luar negeri dalam upaya melakukan perlindungan terhadap rakyat Amerika Serikat, Trump melakukan pembangunan kembali militer di Amerika Serikat dengan menandatangani undang-undang yang memberi otorisasi \$ 716 miliar untuk pertahanan nasional AS (TheWhiteHouse, President Donald J. Trump is Rebuilding and Readying Our Military to Defend Against All Threats, 2018). Presiden Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain untuk tahun 2019, yang memberikan wewenang sebesar \$ 716 miliar untuk pertahanan nasional. Bersama dengan para sekutunya di tahun 2019, undang-undang ini

memberikan wewenang dana untuk operasi dan keterlibatan dalam kegiatan pertahanan dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat. UU ini memberikan dukungan penuh dari Presiden Trump terhadap Israel, untuk memberikan otorisasi dana sejumlah 500 juta dolar AS untuk pengembangan bersama dan ko-produksi sistem pertahanan rudal. Dana yang disahkan oleh akan membantu Amerika Serikat dan mitranya melanjutkan perjuangan untuk menghancurkan ISIS, termasuk \$ 850 juta untuk melatih dan melengkapi Pasukan Keamanan Irak. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional akan memperkuat upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanan mitra Eropa, termasuk pemberian dana 250 juta dolar AS yang didedikasikan untuk bantuan keamanan untuk Ukraina (TheWhiteHouse, President Donald J. Trump is Rebuilding and Readyng Our Military to Defend Against All Threats, 2018).

Pada proses pembuatan politik luar negeri Amerika Serikat dalam hal keamanan dan pertahanan ini sangat didominasi peran dari aktor-aktor negara. Pembuatan keputusan akhir ada pada presiden Amerika Serikat namun harus memperoleh persetujuan dari kongres terlebih dahulu, karena presiden dan kongres merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pembuatan sebuah kebijakan luar negeri. Adanya Dewan Keamanan Nasional, CIA, Departemen Luar Negeri, dan juga Departemen Perdagangan memberikan perannya sebagai penyedia sumber informasi yang dibutuhkan oleh presiden dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Untuk melaksanakan politik luar negeri dalam hal keamanan dan pertahanan ini peran dari Departemen Pertahanan sangat dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian dan terlindunginya kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Supaya dapat terciptanya keamanan di dalam negeri, maka Amerika Serikat perlu kerjasama dari semua lapisan masyarakat di negara ini karenan

keamanan dan pertahanan merupakan tanggung jawab bersama.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan bagaimana kebijakan luar negeri untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeripun ikut mengalami perubahan. Dalam skripsi ini terdapat kasus yang menarik untuk melihat perubahan tersebut. Kasus tersebut adalah ketika Amerika dipimpin oleh presiden Barack Obama Amerika masuk dalam negosiasi TPP, kemudian di era pemerintahan Donald Trump keputusan tersebut dianulir dengan keluar dari TPP. Pada saat ini isu kerjasama internasional sedang menyita perhatian masyarakat Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya lagi hal ini akan dibicarakan oleh penulis pada bagian bab tiga di skripsi ini.